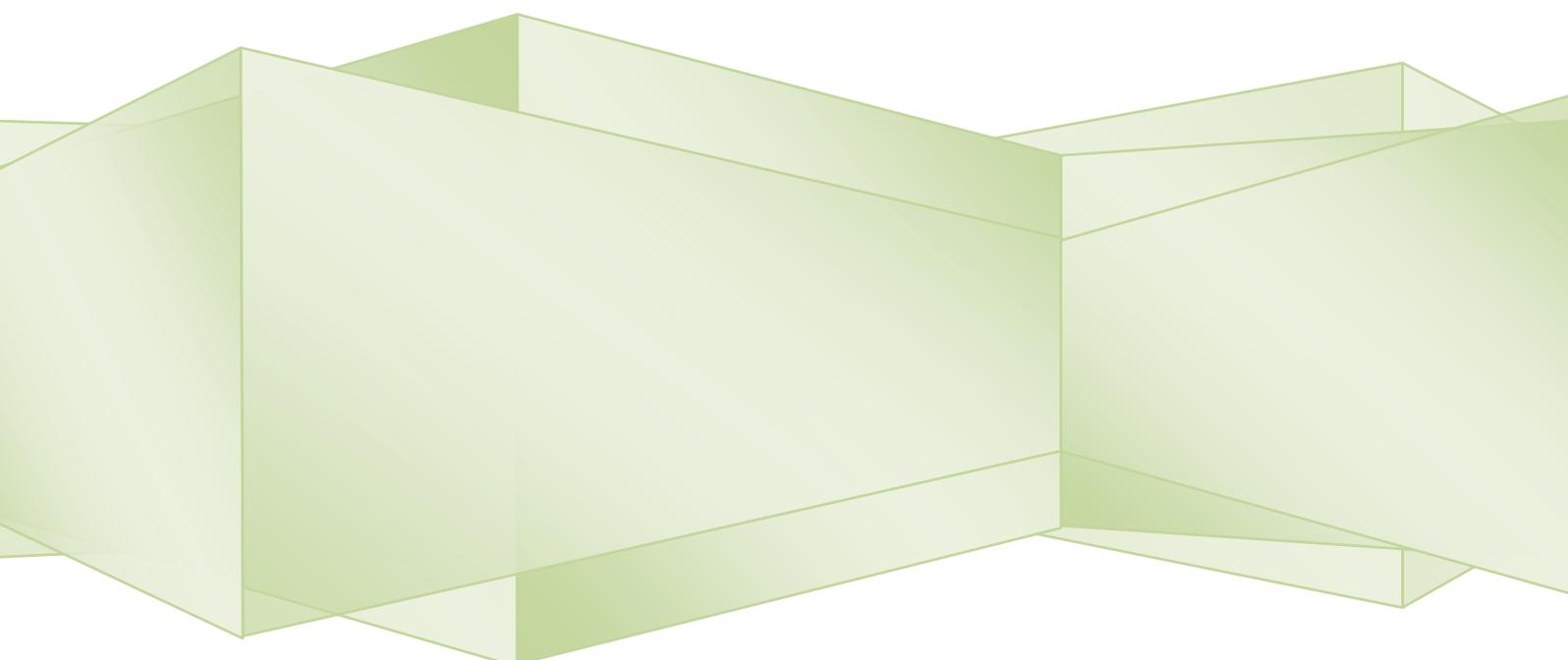


PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019



Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda

Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

e-mail : info@pa-bima.go.id

www.pa-bima.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BIMA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda

Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

e-mail : info@pa-bima.go.id

www.pa-bima.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

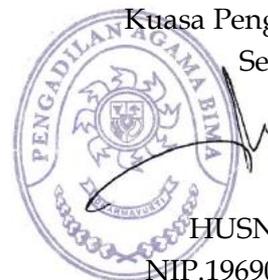
Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PB/05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 30 Juni 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



HUSNINAS, S.Ag.
NIP.196903132003121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan.....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A.1. Dasar Hukum	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima.....	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran.....	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	25
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	25
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
C.1. Aset Lancar	29
C.2. Aset Tetap	31
C.3. Aset Lainnya	35
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	35
C.6. Ekuitas	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	37
D.2. Beban Pegawai.....	37

D.3. Beban Persediaan	38
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	38
D.5. Beban Pemeliharaan.....	39
D.6. Beban Perjalanan Dinas	40
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	40
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	40
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih.....	42
D.11. Beban Lain-lain.....	42
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	42
D.13. Pos Luar Biasa.....	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	43
E.1. Ekuitas Awal.....	43
E.2. Surplus (defisit) LO.....	43
E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan.....	44
Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan (Rp 8.286.600).....	44
E.4. Koreksi Nilai Persediaan.....	44
E.5. Koreksi Aset Tetap.....	44
E.6. Transaksi Antar Entitas	44
E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas.....	45
E.8. Ekuitas Akhir.....	45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	45
F.2. Pengungkapan Lain-lain	45
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap Pengadilan Agama Bima.....	Error! Bookmark not defined.
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	52

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018	3
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018	4
Tabel 3 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018	4
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	23
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat	23
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2019	25
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2019 dan 2018.....	25
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019	26
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019	26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018	26
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	27
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	28
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	28
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018	29
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	29
Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni 2018.....	30
Tabel 17 Rincian Aset Tetap	31
Tabel 18 Rincian Saldo Tanah.....	31
Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
Tabel 20 Rincian Aset Lainnya	35
Tabel 21 Rincian Aset tak Berwujud.....	35
Tabel 22 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018.....	36
Tabel 23 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2019	41
Tabel 24 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	41
Tabel 25 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2019 dan TA 2018.....	42
Tabel 26 Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	42
Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	44
Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	44
Tabel 29 Rincian Beban Barang Untuk di Serahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	45
Tabel 30 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	46
Tabel 31 Rincian Beban Penyusutan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	46
Tabel 32 Rincian Beban Piutang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	47
Tabel 33 Rincian Beban Lain-Lain per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018	47
Tabel 34 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	48
Tabel 35 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	48
Tabel 36 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	49
Tabel 37 Rincian Koreksi Atas Beban per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	50
Tabel 38 Rincian Koreksi Atas Pendapatan per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018.....	50

PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Bima

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda - Nusa Tenggara Barat
Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156 e-mail : info@pa-bima.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Raba - Bima, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Husninas,S.Ag.
NIP.196903132003121002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 946.589 atau mencapai 29.58 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3.200.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 3,291,055,874 atau mencapai 49,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6,597,537,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Estimasi Pendapatan Negara	3.200.000	946.589	29.58	811.362
Belanja Negara	6.597.537.000	3.291.055.874	49.88	3.279.716.985

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.7.268.967.111, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.54.210.500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.7.214.756.611; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.38.500.000. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 38.500.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.7.230.467.111. Jumlah Kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 7.268.967.111;

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30.06.2019	30.06.2018	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	54,210,500	64,340,300	(10,129,800)	-16%
Aset Tetap	7,214,756,611	9,019,542,845	(1,804,786,234)	-20%
Aset Lainnya	0	0	-	-
Jumlah Aset	7,268,967,111	9,083,883,145	(1,814,916,034)	-20%
Kewajiban				
Uang Muka dari	38,500,000	40,000,000	(1,500,000)	-4%
Utang Kepada Pihak	0	0	-	-
Jumlah Kewajiban	38,500,000	40,000,000	(1,500,000)	-4%
Ekuitas				
Ekuitas	7,230,467,111	9,043,883,145	(1,813,416,034)	-20%
Jumlah Ekuitas	7,230,467,111	9,043,883,145	(1,813,416,034)	-20%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7,268,967,111	9,083,883,145	(1,814,916,034)	-20%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.811.362, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.3.291.378.104 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(3,341,320,416). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. (3.000) dan surplus (defisit) sebesar Rp.0. Sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (3,341,323,416).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 7,281,681,242 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 3,341,323,416) Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3,290,109,285, penurunan ekuitas sebesar (Rp. 51,214,131) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 7,230,467,111.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

1. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3,200,000	946,589	29,58	811.362
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	946,589	29,58	811.362
B. Belanja Negara	B.2				
1 Belanja Pegawai	B.2.1.	5,594,511,000	2,804,670,684	50.13	2.850.549.06
2 Belanja Barang	B.2.2.	964,026,000	486,385,190	50.45	429.167.925
3 Belanja Modal	B.2.3.	39,000,000	0	0	0
Jumlah Belanja Negara		6,597,537,000	3,291,055,874	50.39	3.279.716.98

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA BIMA
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30-Jun-19	31-Des-18
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	38,500,000	1,771,200
Persediaan	C.1. 2.	15,710,500	1,994,600
Jumlah Aset Lancar		54,210,500	3,765,800
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	3.538.955.000	3.538.955.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,295,842,935	2,295,842,935
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	3,582,296,000	3,582,296,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	145.904.200	145.904.200
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	4.991.720	4.991.720
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(2,353,233,244)	(2,246,346,288)
Jumlah Aset Tetap		7,214,756,611	7,321,643,567
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	12.100.000	12.100.000
Aset lainnya yang belum diregister	C.4. 2.	-	-
Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya	C.4. 3.	(12.100.000)	(12.100.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset		7,268,967,111	7,325,409,367
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada pihak ke 3		-	41,956,925
Uang Muka dari KPPN		38,500,000	1,771,200
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		38,500,000	43,728,125
Jumlah Kewajiban		38,500,000	43,728,125
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		7,230,467,111	7,281,681,242
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		7,268,967,111	7,325,409,367

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30-Jun-19	30-Jun-18
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	946,589	811.362
Jumlah Pendapatan		946,589	811.362
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2,770,541,684	2.735.759.060
Beban Persediaan	D. 3	16,378,100	15.896.700
Beban barang dan Jasa	D. 4	186,605,365	167.741.625
Beban Pemeliharaan	D. 5	188,213,600	185.883.600
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	73,641,300	31.217.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	106,886,956	154.880.119
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		3,342,267,005	3.291.378.104
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		-3,341,320,416	(3.290.566.742)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-3,000	42,000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa			
D. 13			
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		-3,341,323,416	(3.290.524.742)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30-Jun-19	30-Jun-18
Ekuitas Awal	E. 1	7,281,681,242	9.055.502.264
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	-3,341,323,416	(3.290.524.742)
Koreksi Yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Lain-lain			
Selisih Revaluasi aset Tetap	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Lain Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain Lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	3,290,109,285	3.278.905.623
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	-51,214,131	(11.619.119)
Ekuitas Akhir		7,230,467,111	9.043.883.145

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PB.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemadirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Perkara

Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan menggunakan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

2. Bidang Pengawasan Internal

Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidental, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidental.

3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian

4. Bidang Pengelolaan Keuangan

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

5. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai

negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2018 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

<i>Kualitas Piutang</i>	<i>Uraian</i>	<i>Penyisihan</i>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2018 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2019.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
946.589

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 946,589 atau mencapai 29.58 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.200.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131)	3.200.000	946,589	29.58
Total Pendapatan		3.200.000	946.589	29.58

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 135,227 atau 16.67 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena ada pendapatan dari biaya sewa rumah dinas oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan Rp.	%
1.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	946,589	811.362	135,227	16.67
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
Total Pendapatan		946,589	811.362	135,227	16.67

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
3,291,055,87
4

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 3,291,055,874 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 49.88% dari anggaran senilai Rp. 6,597,537,000. Rincian anggaran dan realisasi

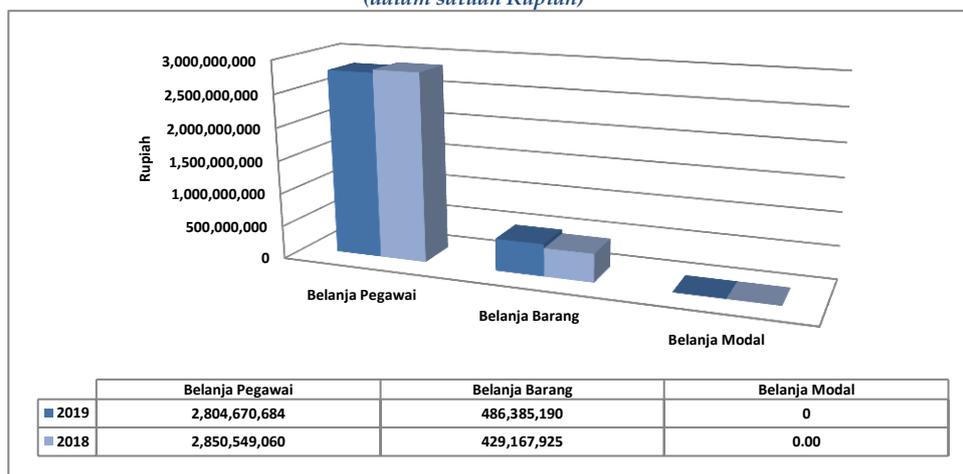
belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5,594,511,000	2,804,670,684	50,13
Belanja Barang	964,026,000	486,385,190	50,45
Belanja Modal	39,000,000	0	0,00
Total Belanja Bruto	6,597,537,000	3,291,055,874	49,88
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	6,597,537,000	3,291,055,874	49,88

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2019 & 2018

Realisasi Belanja Negara secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp. 11,338,889 atau sebesar 0,34 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	2,804,670,684	2,850,549,060	(45,878,376)	-1.64%
Belanja Barang	486,385,190	429,167,925	57,217,265	11.76%
Belanja Modal	0	0	0	0.00%
Total Belanja	3,291,055,874	3,279,716,985		9,68

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.
2,804,670,684

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 2,804,670,684 dan Rp. 2.850.549.060.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. (45,878,376),- atau sebesar (1,64) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya 2(dua) orang pegawai Pengadilan Agama Bima yang purnabakti pada awal tahun 2019 serta 3 (tiga) orang pegawai yang dipromosikan ke beberapa pengadilan agama yang lain.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,390,422,380	1,330,600,200	59,822,180	4%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,341	20,128	3,213	16%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	108,323,420	106,135,800	2,187,620	2%
Belanja Tunj. Anak PNS	38,604,124	38,937,528	(333,404)	-1%
Belanja Tunj. Struktural PNS	18,200,000	18,200,000	-	0%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	792,235,000	805,665,000	(13,430,000)	-2%
Belanja Tunj. PPh PNS	100,911,264	101,961,344	(1,050,080)	-1%
Belanja Tunj. Beras PNS	71,261,280	75,534,060	(4,272,780)	-6%
Belanja Uang Makan PNS	210,449,000	304,110,000	(93,661,000)	-31%
Belanja Tunjangan Umum PNS	14,845,000	14,035,000	810,000	6%
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	59,400,000	55,350,000	4,050,000	7%
Total Belanja Brutto	2,804,674,809	2,850,549,060	-45,874,251	-2%
Pengembalian Belanja	-4,125	0	(4,125)	
Total Belanja Netto	2,804,670,684	2,850,549,060	-45,878,376	-2%

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
486,385,190

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 486,385,190 dan Rp. 429.167.925.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 18,21 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena terlambanya realisasi belanja modal yang disebabkan oleh masih direncanakan dilakukan revisi pada belanja Modal.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	156,516,666	140,098,300	16,418,366	12%
Belanja Barang Persediaan	30,097,000	37,200,000	(7,103,000)	-19%
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0%
Belanja Jasa	37,916,624	35,146,525	2,770,099	8%
Belanja Pemeliharaan	188,213,600	185,506,100	2,707,500	1%
Belanja Perjalanan Dinas	73,641,300	31,217,000	42,424,300	136%
Total Belanja Brutto	486,385,190	524,707,892	-38,322,702	-7%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0%
Total Belanja Netto	486,385,190	524,707,892	-38,322,702	-7%

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Sampai pada periode pelaporan tanggal 30 Juni 2019 ini belum terjadi realisasi belanja modal pada Kantor Pengadilan Agama Bima.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Penambahan nilai Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan				
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 54,210,500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 54,210,500 dan Rp. 3,765,800.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Kas di bendahara Pengeluaran	38,500,000	1,771,200
Persediaan	15,710,500	1,994,600
Total Aset Lancar	54,210,500	3,765,800

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 38,500,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 38,500,000 dan Rp. 1,771,200.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 sebesar Rp.38,500,000 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Tunai di brankas	38,500,000	0
2.	Kwitansi UP	0	0
	Jumlah	38,500,000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 15 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Belanja Dibayar di Muka (Persekot gaji)	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp. 15,710,500

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.15,710,500 dan Rp. 1,994,600. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni 2018

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	15.710.500	24.310.300
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	30.000
Total		15.710.500	24.340.300

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan senilai Rp. 15,710,500 berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik nomor: W22-A5/654/PL. 03/VII/2019 Tanggal 30 Juni 2019.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap: Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp. 7,214,756,611 dan Rp.7,321,643,567. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
Tanah	3,538,955,000	3,538,955,000	0
Peralatan dan Mesin	2,295,842,935	2,295,842,935	0
Gedung dan Bangunan	3,582,296,000	3,582,296,000	0
Jalan , Irigasi, dan Jaringan	145,904,200	145,904,200	0
Aset Tetap Lainnya	4,991,720	4,991,720	0
Jumlah	9,567,989,855	9,567,989,855	0
Akumulasi Penyusutan	(2,353,233,244)	(2,246,346,288)	-106,886,956
Nilai Buku Aset Tetap	7,214,756,611	7,321,643,567	-106,886,956

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.538.955.000 dan Rp. 3.538.955.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	1.268 M ²	HAK PAKAI 01 / BG 661984	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	2.565.027.000
2.	1	920 M ²	HAK PAKAI 01 / BG 661983	Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI	Pengadilan Agama Bima	391.168.000
Jumlah						3.538.955.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah tidak mengalami perubahan, karena sampai pada periode pelaporan per 30 Juni 2019 tidak ada transaksi yang merubah nilai aset tanah.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2,295,842,935*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,295,842,935 dan Rp. 2,295,842,935.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	2,295,842,935
Mutasi Tambah	
Pembelian Peralatan dan Mesin	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	2,295,842,935
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	-2,147,636,067
Nilai Buku 30 Juni 2019	148,206,868

Nilai Perolehan aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 tidak mengalami perubahan karena sampai periode pelaporan Semester I TA 2019 tanggal 30 Juni 2019 tidak ada transaksi pembelian atau penjualan aset tetap berupa peralatan dan mesin.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
3,582,296,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 3,582,296,000 dan Rp. 3,582,296,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2018	3,582,296,000
Mutasi Tambah:	
Revaluasi Aset	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	3,582,296,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	-177,837,648
Nilai Buku 30 Juni 2019	3,404,458,352

Nilai Perolehan aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 tidak mengalami perubahan karena sampai periode pelaporan Semester I TA 2019 tanggal 30 Juni 2019 tidak ada transaksi pembelian atau penjualan aset tetap Gedung dan Bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
145.904.200*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 145.904.200 dan Rp. 145.904.200.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2018	145.904.200
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	145,904,200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	-27,759,529
Nilai Buku 30 Juni 2019	118,144,671

Saldo tersebut merupakan saldo untuk jaringan kantor Pengadilan Agama Bima. Saldo tersebut tetap atau tidak berubah per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2019 karena tidak ada penambahan jaringan untuk Kantor Pengadilan Agama Bima sampai tanggal 30 Juni Tahun 2019.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
4.991.720*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.991.720 dan Rp. 4.991.720.

Nilai perolehan Aset tetap Lainnya tidak berubah per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2019 senilai Rp.4.991.720,- dikarenakan tidak ada transaksi penambahan

atau transaksi pengurangan aset tetap lainnya untuk Kantor Pengadilan Agama Bima selama sampai Bulan Juni Tahun 2019.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Juni 2018	4.991.720
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	4.991.720
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku 30 Juni 2019	4.991.720

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp.
[2,353,233,244]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.(2,353,233,244) dan Rp.(2,246,346,288).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 19 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2,295,842,935	-2,147,636,067	148,206,868
Gedung dan Bangunan	3,582,296,000	-177,837,648	3,404,458,352
Jalan , Irigasi, dan Jaringan	145,904,200	-27,759,529	118,144,671
Aset Tetap Lainnya	4,991,720	0	4,991,720
Jumlah	6,029,034,855	-2,353,233,244	3,675,801,611

Aset Lainnya:
Rp. 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 17 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Aset tak Berwujud	12.100.000	12.100.000
Aset Lainnya belum diregister	0	0
Nilai perolehan Aset Lainnya	12.100.000	12.100.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.100.000)	(12.100.000)
Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.3.1 Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud:
Rp. 12.100.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.100.000 dan Rp. 12.100.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun rincian ATB per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software IT Kantor Pengadilan Agama Bima	12.100.000
Jumlah Total		12.100.000

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bima berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2019.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek:
Rp. 38,500,000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 38,500,000 dan Rp. 43,728,125. Kewajiban Jangka Pendek

merupakan kelompok kewajiban yang di harapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 43,728,125.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 22 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Utang kepada Pihak Ketiga	0	41,956,925
Uang muka dari KPPN	38,500,000	1,771,200
Jumlah	38,500,000	43,728,125

Saldo kewajiban jangka pendek Rp. 38,500,000 adalah berupa Uang muka dari KPPN untuk periode Tahun Anggaran 2019

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 38,500,000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 38,500,000 Rp. 1,771,200. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.
7,260,738,111*

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.7,260,738,111 dan Rp. 7,281,681,242. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
946,589*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 946,589 dan Rp. 811.362. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 23 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
2.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (423141)	0	0	0,00
3.	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131)	3,200,000	946,589	29,58
Total Pendapatan		3,200,000	946,589	29,58

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp.
2,804,670,684*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,804,670,684 dan Rp. 2.735.759.060. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 24 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,390,422,380	1,330,600,200	59,822,180	4%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,341	20,128	3,213	16%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	108,323,420	106,135,800	2,187,620	2%
Belanja Tunj. Anak PNS	38,604,124	38,937,528	(333,404)	-1%

Belanja Tunj. Struktural PNS	18,200,000	18,200,000	-	0%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	792,235,000	805,665,000	(13,430,000)	-2%
Belanja Tunj. PPh PNS	100,911,264	101,961,344	(1,050,080)	-1%
Belanja Tunj. Beras PNS	71,261,280	75,534,060	(4,272,780)	-6%
Belanja Uang Makan PNS	210,449,000	304,110,000	(93,661,000)	-31%
Belanja Tunjangan Umum PNS	14,845,000	14,035,000	810,000	6%
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	59,400,000	55,350,000	4,050,000	7%
Total Belanja Brutto	2,804,674,809	2,850,549,060	-45,874,251	-2%
Pengembalian Belanja	-4,125	0	(4,125)	
Total Belanja Netto	2,804,670,684	2,850,549,060	-45,878,376	-2%

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp. 16,378,100*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 16,378,100 dan Rp. 15.896.700 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	16,378,100	15,896,700	481,400	3%
Total Beban Persediaan	16,378,100	15,896,700	481,400	3%

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp. 186,605,365*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 186,605,365 dan Rp. 167.741.625 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	129,146,166	111,385,900	17,760,266	16%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,940,000	5,903,500	36,500	1%
Beban Honor Operasional Satker	19,750,000	19,750,000	0	0%
Beban Barang Operasional lainnya	825,000	2,200,000	-1,375,000	-63%
Beban Langganan Telepon	411,620	555,231	-143,611	-26%
Beban Langganan Telepon	30,532,579	27,946,994	2,585,585	9%
Total Beban Jasa	186,605,365	167,741,625	18,863,740	11%

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 188,213,600*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 188,213,600 dan Rp.185.883.600. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119,537,100	127,372,500	-7,835,400	-6%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68,676,500	37,333,600	31,342,900	84%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	0	20,800,000	-20,800,000	-100%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	377,500	-377,500	-100%
Total Beban Pemeliharaan	188,213,600	185,883,600	2,330,000	1%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
73,641,300*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 73,641,300 dan Rp.31.217.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	73,641,300	31,217,000	42,424,300	136%
Total Beban Perjalanan Dinas	73,641,300	31,217,000	42,424,300	136%

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019

dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.106,886,956

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.106.886.956 dan Rp.154.880.119. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	60,014,761	89,428,239	-29,413,478	-33%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44,459,411	63,039,096	-18,579,685	-29%
Beban Penyusutan Jaringan	2,412,784	2,412,784	0	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	-
Jumlah Penyusutan	106,886,956	154,880,119	-47,993,163	-31%
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	-
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	0	-
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	106,886,956	154,880,119	-47,993,163	-31%

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk

periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
-	-	-	-	-
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos
Luar Biasa :
Rp. 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.
7,281,681,242*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.7,281,681,242 dan Rp9.055.502.264.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisi)
LO : (Rp.
3,341,323,416)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp. 3,341,323,416) dan (Rp3.290.524.742) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Nilai Persediaan

Koreksi yang menambah : Rp.0

Koreksi Yang menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan (Rp 8.286.600)

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan : Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2019 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.5. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp.0

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.6. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas : Rp 3,290,109,285

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3,290,109,285 dan Rp 3.278.905.623.

E.7. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan ekuitas : (Rp. 51,214,131) Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp 51,214,131) dan (Rp 11.619.119).

E.8. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp 7,230,467,111 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.7,230,467,111 dan Rp9.043.883.145.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang dapat untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada pemeriksaan BPK untuk laporan keuangan Tahun 2018 Pengadilan Agama Bima sehingga tidak ada tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode pelaporan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. BIMA A/C 0079-01-000423-30-8 a.n. Bendahara Pengadilan Agama Bima yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2019 telah dilakukan revisi DIPA dengan Nomor DIPA- 005.01.2.307928/2019 untuk akun 521111.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2019 tidak ada informasi Ralat SPM, SSBP, SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2019 tidak ada catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN,
DAN NILAI BUKU ASET TETAP*

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
PER TANGGAL 30 JUNI 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 005.01.23.307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 2 OKTOBER 2019						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN		501	2,347,601,235	2,100,379,606	60,014,761	0	2,160,394,367	187,206,868
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	3	487,000,003	487,000,003	0	0	487,000,003	0
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	8	141,130,400	139,742,514	1,387,886	0	141,130,400	0
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	2	15,361,669	11,451,669	977,500	0	12,429,169	2,932,500
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	9,834,073	9,834,073	0	0	9,834,073	0
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	17	58,702,797	51,472,797	3,615,000	0	55,087,797	3,615,000
3.05.01.04.003	Rak Besi	Buah	11	36,473,272	36,473,272	0	0	36,473,272	0
3.05.01.04.004	Rak Kayu	Buah	10	22,799,996	22,799,996	0	0	22,799,996	0
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	12,110,660	12,110,660	0	0	12,110,660	0
3.05.01.04.013	Buffet	Buah	4	9,548,000	7,708,000	920,000	0	8,628,000	920,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	20,000,000	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	10,000,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	1	25,544,667	25,544,667	0	0	25,544,667	0
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	29,599,998	29,599,998	0	0	29,599,998	0
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	2,089,959	2,089,959	0	0	2,089,959	0
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	71	101,406,590	91,506,590	4,950,000	0	96,456,590	4,950,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	148	249,687,711	222,787,711	9,950,000	0	232,737,711	16,950,000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	4	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000	0
3.05.02.01.005	Sice	Buah	9	45,774,995	44,264,995	755,000	0	45,019,995	755,000
3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	8	16,311,328	16,311,328	0	0	16,311,328	0
3.05.02.01.007	Bangku Panjang Kayu	Buah	16	5,214,000	5,214,000	0	0	5,214,000	0
3.05.02.01.008	Meja Rapat	Buah	6	13,806,000	13,806,000	0	0	13,806,000	0
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	18	12,867,924	12,867,924	0	0	12,867,924	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
PER TANGGAL 30 JUNI 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

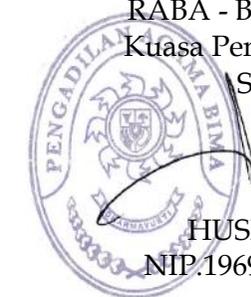
NAMA UAKPB : 005.01.23.307928 PENGADILAN AGAMA BIMA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 2 OKTOBER 2019						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	Buah	3	13,525,800	11,925,800	800,000	0	12,725,800	800,000
3.05.02.04.001	Lemari Es	Buah	1	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	28	154,100,000	130,100,000	4,000,000	0	134,100,000	20,000,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	2	21,124,000	9,124,000	2,000,000	0	11,124,000	10,000,000
3.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	405,000	405,000	0	0	405,000	0
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	1	1,700,000	1,700,000	0	0	1,700,000	0
3.05.02.06.017	Unit Power Supply	Buah	8	28,403,462	16,403,462	2,000,000	0	18,403,462	10,000,000
3.05.02.06.020	Camera Video	Buah	1	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	2	24,000	24,000	0	0	24,000	0
3.05.02.06.033	Water Filter	Buah	1	84,000	84,000	0	0	84,000	0
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	3	272,000	272,000	0	0	272,000	0
3.05.02.06.040	Palu Sidang	Buah	2	24,000	24,000	0	0	24,000	0
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	Buah	1	3,769,920	3,769,920	0	0	3,769,920	0
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	1	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0
3.05.02.06.060	Asbak Tinggi	Buah	8	3,999,992	3,999,992	0	0	3,999,992	0
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	12,995,000	12,695,000	150,000	0	12,845,000	150,000
3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	Buah	2	79,999,998	79,999,998	0	0	79,999,998	0
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	570,000	570,000	0	0	570,000	0
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	26	247,680,637	212,973,137	12,353,750	0	225,326,887	22,353,750
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	23	303,200,324	215,132,831	10,471,250	0	225,604,081	77,596,243
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	5	26,510,000	26,510,000	0	0	26,510,000	0
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	26	38,594,060	31,039,060	2,527,500	0	33,566,560	5,027,500

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL, EKSTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
PER TANGGAL 30 JUNI 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 2 OKTOBER 2019						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10.02.04.001	Server	Buah	2	62,500,000	62,500,000	0	0	62,500,000	0
3.10.02.04.002	Router	Buah	1	9,255,000	6,941,250	1,156,875	0	8,098,125	1,156,875
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		5	3,582,296,000	133,378,237	44,459,411	0	177,837,648	3,404,458,352
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	3,279,015,000	122,963,063	40,987,687	0	163,950,750	3,115,064,250
4.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	21,930,000	774,000	258,000	0	1,032,000	20,898,000
4.01.02.02.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	118,509,000	4,444,088	1,481,362	0	5,925,450	112,583,550
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	1	162,842,000	5,197,086	1,732,362	0	6,929,448	155,912,552
134113	JARINGAN		2	145,904,200	25,346,745	2,412,784	0	27,759,529	118,144,671
5.04.02.01.001	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	Unit	1	125,500,000	15,144,645	1,902,679	0	17,047,324	108,452,676
5.04.03.04.999	Jaringan Dengan Media Udara Lainnya		1	20,404,200	10,202,100	510,105	0	10,712,205	9,691,995
TOTAL				6,075,801,435	2,259,104,588	106,886,956	0	2,365,991,544	3,709,809,891

RABA - BIMA, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



HUSNINAS, S.Ag.
NIP.196903132003121002

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*



PENGADILAN AGAMA BIMA

KELAS 1-B

Jln. Gatot Subroto No.10 Raba Bima Telp. (0374) 43209 Fax. 45156

Web Site: <http://pa-bima.go.id> e-mail info@pa-bima.go.id

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon 1/UAPPA-EI : (01) Badan Urusan Administrasi
 UAPPA-W : 400559 Prop. Nusa Tenggara Barat
 Satuan Kerja/UAKPA : 307928 Pengadilan Agama Bima

No.	Pendapatan/belanja	Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Realisasi Menurut Basis Akrual
			Tambah	Kurang	
A	Pendapatan Negara dan Hibah				
I	Penerimaan Perpajakan				
	1. Pajak Dalam negeri	0	0	0	0
	2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0
II	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
	3. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
	4. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	0	0	0	0
	5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6	0	0	6
III	Penerimaan Hibah	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan hibah	946.589	0	0	946.589
B	Belanja Negara				
I	Belanja Pemerintah Pusat				
	1. Belanja Pegawai	2.804.670.684	0	0	2.804.670.684
	2. Belanja Barang	486.385.190	0	0	486.385.190
	3. Belanja Modal	0	0	0	0
	4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0			0
	5. Belanja Subsidi	0	0	0	0
	6. Belanja Hibah	0	0	0	0
	7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
	8. Belanja Lain-Lain	0	0	0	0
II	Transfer ke Daerah				
1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0
	b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0

	b. Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0
1	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian				
	a. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
	b. Dana Penyesuaian	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara	3.291.055.874	0	0	3.291.055.874

RABA - BIMA, 30 Juni 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



HUSNINAS,S.Ag.

NIP.196903132003121002



PENGADILAN AGAMA BIMA KLAS IB

Jln. Gatot Subroto No.10 Raba Bima Telp. (0374) 43209 Fax. 45156

Web Site: <http://pa-bima.go.id> e-mail info@pa-bima.go.id

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon 1/UAPPA-E I : (01) Badan Urusan Administrasi
UAPPA-W : 400559 Prop. Nusa Tenggara Barat
Satuan Kerja/UAKPA : 307928 Pengadilan Agama Bima

No	Pendapatan/Belanja		Realisasi	Penyesuaian		Informasi Akrual (Rp)	Dokumen Sumber
			Menurut	Akrual (Rp)			
	Kode Akun	Uraian	Basis Kas	Tambah	Kurang		
NIHIL							



RABA - BIMA, 30 Juni 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

HUSNINAS,S.Ag.
NIP.1969031320031210